

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD )

Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN .....

## SISTEMATIKA LPPD

Kata Pengantar ..... (maksimum 2 halaman)

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
  - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
  - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
  - 3. Kondisi Ekonomi;
    - a. Potensi Unggulan Daerah
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

### BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

### BAB III URUSAN DESENTRALISASI

- A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
  - 1. Program Dan Kegiatan
  - 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
  - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
  - 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
  - 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
  - 6. Proses Perencanaan Pembangunan

7. Kondisi . . .

7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
  8. Permasalahan Dan Solusi
  9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program Dan Kegiatan
  2. Realisasi Program Dan Kegiatan
  3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
  4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
  5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
  6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
  7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
  8. Permasalahan Dan Solusi
  9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

#### BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
  2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  3. Program Dan Kegiatan
  4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
  5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
  6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
  7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
  8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
  9. Permasalahan Dan Solusi
  10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Tugas Pembantuan . . .

- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
  - 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana Dan Prasarana

## BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
  - 1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Bidang Kerjasama
  - 4. Nama Kegiatan
  - 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
  - 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
  - 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
  - 8. Jangka Waktu Kerjasama
  - 9. Hasil (*Output*) Dari Kerjasama
  - 10. Permasalahan Dan Solusi
  - 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
  - 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Bidang Kerjasama
  - 4. Nama Kegiatan
  - 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
  - 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
  - 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
  - 8. Jangka Waktu Kerjasama
  - 9. Hasil (*Output*) Dari Kerjasama
  - 10. Permasalahan Dan Solusi
  - 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan . . .

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan Yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Penanggulangan Dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT



FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DAERAH OTONOM BARU

Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN .....

## SISTEMATIKA LPPD DAERAH OTONOM BARU

Kata Pengantar ..... (maksimum 2 halaman)

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
  - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
  - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
  - 3. Kondisi Ekonomi;
    - a. Potensi Unggulan Daerah
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
  - 4. Pelaksanaan Penetapan Batas Tetap Wilayah

### BAB II PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- A. Dinas, Badan Dan/Atau Kantor Yang Dibentuk
- B. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan
- C. Pengisian Kepegawaian
  - 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan, Pendidikan, Dan Penempatannya Dalam Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Asal Pegawai (daerah induk, pusat, lainnya)
- D. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan (kantor kepala daerah, DPRD, dan kantor perangkat daerah)
- E. Pemindehan Dokumen

### BAB III KEANGGOTAAN DPRD

- A. Pengisian Keanggotaan Dan Jumlah Anggota DPRD
- B. Komposisi Keanggotaan DPRD (asal PARPOL)

BAB IV . . .

#### BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

##### A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

##### B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Program Dan Kegiatan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

#### BAB V TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA (apabila ada)

- A. Dasar Hukum
- B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- C. Program Dan Kegiatan
- D. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- E. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
- F. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

G. Jumlah . . .

- 3 -

- G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- H. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
- I. Permasalahan Dan Solusi
- J. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

## BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT

FORMAT SAMPUL  
LAMBANG DAERAH  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
( LKPJ )

Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN .....

## SISTEMATIKA LKPJ

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)
- B. Gambaran Umum Daerah
  - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
  - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
  - 3. Kondisi Ekonomi;
    - a. Potensi Unggulan Daerah
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

### BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- C. Prioritas Daerah

### BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
  - 2. Target Dan Realisasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan Dan Solusi
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
  - 2. Target Dan Realisasi Belanja
  - 3. Permasalahan Dan Solusi

### BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
  - 1. Program Dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan Dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan . . .



2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan Dan Solusi
- D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan Dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan Dan Solusi
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
  2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
  3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
  4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
  5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
  2. Sumber Anggaran
  3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
  2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3. Jumlah . . .

- 4 -

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan Dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

## BAB VII PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan